

Hegemoni Perlindungan Perempuan Pada Wacana Kebijakan Gerbong Khusus Wanita di KRL: Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Menteri PPPA

Ahmad Sunardi, Ilmu Komunikasi, Universitas Harkat Negeri, Tegal. Indonesia
ahmadsunardi@harkatnegeri.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hegemoni wacana *gender* dan kontestasi ruang publik pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi terhadap wacana kebijakan gerbong khusus Wanita di KRL yaitu usulan penempatan gerbong tengah khusus untuk perempuan. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis teori Norman Fairclough dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data primer berupa transkrip pernyataan Menteri PPPA pada media daring nasional dan respon warganet di media sosial. Hasil penelitiannya adalah wacana perlindungan negara terhadap perempuan karena dinilai sebagai kelompok rentan dan membutuhkan gerbong khusus. Media masa dan pemerintah membangun dominan tentang perlindungan dan kenyamanan bagi kelompok perempuan. Media sosial menanggapi dengan tandingan yaitu mengkritisi segregasi *gender* dan menunjukkan kehadiran negara yang tidak memberikan keadilan keamanan secara menyeluruh. Pemisahan ruang sosial pada penempatan gerbong Wanita menunjukkan kontestasi antara ideologi kesetaraan *gender* dengan perlindungan Perempuan. Media digital dan bahasa berkontribusi terhadap konstruksi sosial berkaitan dengan Perempuan, keamanan, dan keadilan keamanan pada ruang publik. Kontribusi penelitian ini Adalah pengembangan kajian komunikasi, analisis wacana kritis, *gender* dalam memahami relasi kuasa dan keadilan keamanan pada ruang umum.

Kata kunci: Kontestasi Wacana *Gender*, Keadilan Keamanan, Media Digital, Ruang Publik

Abstract The purpose of this study is to analyze the hegemony of gender discourse and the contestation of public space in the statement by the Minister of Women's Empowerment and Child Protection, Arifah Fauzi, regarding the policy of women-only carriages on the commuter train (KRL), specifically the proposal to allocate the middle carriage exclusively for women. This research method uses Norman Fairclough's critical discourse analysis theory with a qualitative approach that analyzes texts, discursive practices, and social practices. The primary data consists of transcripts of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection's statements in national online media and netizen responses on social media. The results reveal a discourse on state protection for women, as they are considered a vulnerable group requiring special carriages. The mass media and the government construct a dominant narrative of protection and comfort for women. Social media responds with counter-arguments, criticizing gender segregation and pointing out that the state's presence fails to provide comprehensive security justice. The separation of social space in the placement of the women's carriage demonstrates the contestation between the ideology of gender equality and the protection of women. Digital media and language contribute to social constructions related to women, security, and security justice in public spaces. The contribution of this research is the development of communication studies, critical discourse analysis, and gender in understanding power relations and security justice in public spaces.

Keywords: Contestation Of Gender Discourse, Security Justice, Digital Media, Public Space

PENDAHULUAN

Kesetaraan *gender* adalah sebuah keharusan yang perlu di perjuangkan dan diterapkan di setiap lini kehidupan. Posisi antara laki-laki dan perempuan sudah tidak perlu diperdebatkan di semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerolehan pendidikan, layanan kesehatan, karier dan kinerja seseorang semuanya mempunyai hak yang sama termasuk dalam fasilitas pelayananan di ruang publik. Setiap orang mempunyai hak yang sama di ruang publik, termasuk hak memperoleh keamanan dan keadilan dalam pelayanan transportasi umum.

Pelayanan transportasi umum bukan hanya arena mobilitas ekonomi dan sosial, tetapi juga pertarungan kebijakan pemerintah, negosiasi identitas, relasi kuasa, dan pertarungan ideologi sosial. Isu keamanan dan kenyamanan perempuan pada transportasi umum menjadi perhatian serius karena sering terjadi kasus pelecehan seksual dan kekerasan berbasis *gender* yang sering terjadi pada ruang publik. Kondisi-kondisi tersebutlah yang memotori kebijakan pemerintah dalam layanan fasilitas umum, termasuk rencana penyediaan gerbong khusus pada layanan KRL.

Penyediaan gerbong khusus wanita sebagai bentuk perlindungan dan keamanan perempuan pada transportasi umum. Kebijakan pemerintah ini bertujuan memberikan rasa aman dan mengurangi risiko pelecehan seksual dpada layanan KRL. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai reaksi dan memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut adalah solusi yang sangat realistis terhadap ancaman kekerasan seksual, tetapi Sebagian yang lain berpendapat bahwa segregasi ruang justru memperkuat stereotip *gender* dan mencerminkan kegagalan pemerintah menciptakan ruang publik yang aman bagi seluruh warga negara.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengusulkan perubahan posisi gerbong khusus wanita ke bagian Tengah, semngtara gerbong laki-laki berada pada posisi depan dan belakang kereta. Pernyataan tersebut menjadi polemik bagi masyarakat hingga menjadi viral diberbagai media digital. Statement tersebut di respons oleh beragam dari masyarakat, media massa, maupun pengguna media sosial. Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut karena alasan peningkatan pengawasan dan keamanan perempuan, tgetapi pihak lain banyak yang mengkritik gagasan tersebut karena dianggap mempertegas segregasi *gender* dalam ruang publik dan bentuk ketidakadilan *gender*.

Isu gerbong khusus wanita tidak hanya menjadi isu kebijakan transportasi semata tetapi menjadi isu sosial mengenai representasi perempuan, relasi kuasa *gender*, dan hak atas ruang publik. Pernyataan menteri PPPA sebagai pejabat publik merefresentasikan bahwa bahasa yang digunakan pejabat publik dan media massa memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial dan opini masyarakat karena bahasa tidak pernah bersifat netral, tidak muncul begitu saja, akan tetapi mengandung kepentingan ideologis yang mempunyai tujuan dan terkadang ditafsirkan oleh masyarakat berbeda.

Berdasarkan teori Norman Fairclough bahwa wacana merupakan praktik sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan ideologi. Bahasa adalah

institusi sosial yang membangun legitimasi terhadap kebijakan tertentu sekaligus memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial sebagai bentuk kuasa. Oleh sebab itu, pernyataan menteri PPPA tentang kebijakan gerbang khusus wanita dapat dipahami sebagai arena kontestasi wacana antara narasi kesetaraan *gender*, perlindungan perempuan dan ideologi kuasa.

Kajian yang berkaitan dengan kesetaraan *gender*, kebijakan pelayanan publik, dan transportasi umum sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Stefani Switly Peginusa, dalam penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Pelayanan Kereta Khusus Wanita KRL* (2023) menyimpulkan bahwa keberadaan gerbang khusus wanita memberikan rasa aman dan nyaman bagi sebagian besar pengguna perempuan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan merasa lebih terlindungi dari potensi pelecehan seksual ketika berada di gerbang khusus dibandingkan gerbang campuran. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek kepuasan pelayanan transportasi oleh kaum Perempuan dan belum mengkaji dimensi ideologi *gender* maupun praktik kekuasaan yang bekerja di balik kebijakan segregasi ruang yaitu pemerintah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nur Aulia (2025) yaitu penelitian berkaitan dengan framing media terhadap kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Penelitian ini membahas media digital cenderung merepresentasikan perempuan sebagai kaum yang lemah, sebagai kaum yang sering menjadi korban dan membutuhkan kehadiran negara sebagai bentuk perlindungan keamanan. Narasi keamanan Perempuan dibangun oleh media sebagai diksi yang menyarakan ancaman, kerentanan, dan perlindungan sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media memiliki peran penting dalam mereproduksi ideologi proteksionis terhadap perempuan pada transportasi umum. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian tentang polemik gerbang khusus wanita karena menunjukkan bagaimana media membentuk persepsi publik bahwa wanita memerlukan perhatian khusus dalam perlindungan dan keamanan pada transportasi umum.

Penelitian berkaitan dengan media digital dan representasi Perempuan juga dilakukan oleh Stephani (2025). Penelitian ini berkaitan dengan feminisme digital di media sosial Instagram. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial menjadi arena baru dalam produksi dan perlawanan terhadap wacana *gender* dominan, wanita bukan hanya sebagai objek representasi media, tetapi Wanita juga menjadi subjek yang aktif membangun narasi tandingan mengenai kesetaraan *gender* serta hak wanita pada layanan umum. Penelitian ini sangat relevan karena polemik kebijakan gerbang khusus bagi perempuan berkembang secara cepat dan luas di media digital sebagai arena kontestasi ideologi *gender* dan sebagai segregasi ruang pada layanan transportasi umum.

Rahmawati dkk. (2024) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan pemberitaan pelecehan seksual pada media digital menyimpulkan bahwa Wanita pada teks berita masih sering diposisikan sebagai objek penderita yang tidak memiliki kuasa atas narasi dirinya sendiri. Media digital cenderung bahwa perempuan korban dan pasif, sementara laki-laki ditempatkan sebagai aktor dominan dalam struktur sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

bahasa media memiliki kekuatan ideologi sosial dan membangun relasi *gender* di masyarakat. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah peran media sebagai konstruksi sosial berkaitan dengan perempuan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan termasuk pada transportasi umum KRL sebagai bentuk perlindungan kaum Perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saliman (2025) dengan judul *Gerbong Khusus Perempuan di KRL Commuter Line: Antara Perlindungan dan Perpetuasi Budaya Patriarki* membahas tentang kebijakan perspektif feminisme liberal pada kebijakan gerbong khusus Wanita. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun kebijakan tersebut efektif mengurangi potensi pelecehan seksual, gerbong khusus wanita juga berpotensi memperkuat konstruksi patriarki yaitu menunjukkan bahwa perempuan Adalah kelompok lemah dan membutuhkan perlindungan khusus. Simpulan dari penelitian ini adalah segregasi ruang belum menyentuh akar masalah structural yaitu victim blaming dan budaya patriarki pada kaum perempuan.

Penelitian-penelitian diatas mumpuni relasi dengan penelitian ini yaitu mengangkat tema “Kontestasi Wacana *Gender* di Ruang Publik: Analisis Kritis terhadap Polemik Gerbong Khusus Wanita KRL” karena sama-sama membahas tentang gerbong khusus wanita sebagai arena pertarungan makna mengenai *gender* dan ruang publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah menganalisis pernyataan menterein PPPA yang menjadi viral dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengungkap praktik bahasa, relasi kuasa, dan ideologi yang muncul dalam polemik publik dan pemberitaan media digital terkait usulan Menteri PPPA tentang pemindahan posisi gerbong Wanita berada di tengah, sementara gerbong laki-laki berada di depan dan di belakang.

Perlindungan dan keamanan perempuan di transportasi publik tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan gerbong khusus wanita tetapi juga perlu adanya system keamanan dan perlindungan untuk semuanya. Pemangku kebijakan pada layanan transportasi umum perlu membangun sistem keamanan yang komprehensif yang disertai dengan system pengawasan, edukasi publik, dan penegakan hukum terhadap kejadian-kejadian yang ada pada transportasi umum.

Penelitian berkaitan dengan kebijakan pada ruang publik dan kebijakan *gender* menunjukkan bahwa media digital menjadi demokrasi wacana publik. Masyarakat kini tidak hanya menerima informasi dari media pemberitaan pemerintah, tetapi juga menerima informasi dari media sosial lainnya. Pernyataan Menteri PPPA tentang gerbong khusus wanita di media sosial memperlihatkan adanya resistensi terhadap dominasi wacana perlindungan perempuan yang dianggap memperkuat segregasi *gender* di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa wacana *gender* saat ini, media digital bersifat dinamis dan terus mengalami negosiasi sosial terhadap permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa kebijakan tentang gerbong khusus wanita masih didominasi

pendekatan pelayanan transportasi, keamanan perempuan, dan persepsi pengguna. Adapun penelitian tentang framing media dan representasi perempuan lebih banyak berfokus pada kasus kekerasan seksual, bahwa perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penelitian “Hegemoni Wacana *Gender* di Ruang Publik: Analisis Kritis terhadap Polemik Gerbang Khusus Wanita KRL” melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis memiliki kebaruan karena mengintegrasikan kajian *gender*, media, komunikasi, dan kekuasaan.

Penelitian ini penting karena membahas tentang isu perlindungan keamanan perempuan di ruang publik dan kontroversi pernyataan menteri PPPA yang menunjukkan bahwa Bahasa mempunyai hegemoni terhadap masyarakat. Penelitian tentang gerbang khusus wanita masih didominasi kajian kebijakan transportasi dan belum banyak dianalisis dari perspektif komunikasi kritis. Penelitian ini mengkaji bagaimana bahasa, media, dan kekuasaan bekerja dalam membentuk konstruksi sosial mengenai perempuan dan ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi wacana *gender* pada polemic kebijakan gerbang khusus wanita di KRL, mengidentifikasi representasi perempuan dalam pernyataan pejabat publik dan media massa, serta mengungkap relasi kuasa dan ideologi yang bekerja di balik wacana yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis teori Norman Fairclough. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, ideologi, dan relasi kuasa yang terkandung dalam teks dan praktik komunikasi berkaitan dengan pernyataan Menteri PPPA tentang kebijakan gerbang khusus wanita pada KRL.

Teori Norman Fairclough dipakai untuk menganalisis teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*). Teori ini dipakai untuk menganalisis bahasa dengan konteks sosial dan ideologi yang melatarbelakanginya.

Objek penelitian berupa wacana kebijakan Menteri PPPA mengenai penataan gerbang wanita di KRL. Data dan sumber data diperoleh dari pernyataan resmi Menteri PPPA, pemberitaan media daring nasional, respons publik di media sosial, penelitian-penelitian sebelumnya, dan buku referensi yang berkaitan dengan ini. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan cara membandingkan pernyataan menteri PPPA, pemberitaan media, dan respons publik untuk memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi Pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan teks pernyataan resmi, artikel berita, dan respons publik yang relevan. Teknik studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis mengenai analisis wacana kritis, *gender*, media, dan ruang publik.

Analisis data dilakukan dengan cara: 1) analisis teks dilakukan untuk mengidentifikasi pilihan diksi, struktur kalimat, metafora, dan representasi sosial dalam teks; 2) analisis praktik diskursif dilakukan untuk melihat proses

produksi, distribusi, dan konsumsi wacana oleh pemerintah, media, dan Masyarakat; 3) analisis praktik sosial dilakukan untuk menghubungkan wacana dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi *gender* dalam masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Perempuan sebagai Subjek Rentan

Berdasarkan data-data dari penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa di ruang publik, wanita direpresentasikan sebagai insan yang rentan dan memerlukan perlindungan negara. Representasi sebagai kelompok rentan dapat di temui dari istilah seperti “perlindungan perempuan”, “keamanan penumpang wanita”, dan “pencegahan pelecehan seksual” yang sering muncul di media digital atau pernyataan resmi pemerintah. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa di ruang publik kelompok wanita memerlukan perhatian dan pelayanan khusus agar kelompok wanita aman dan terlindungi. Konteks dalam bahasa tersebut membangun konstruksi sosial bahwa ruang publik mempunyai potensi berbahasa bagi kaum perempuan.

Representasi yang dibangun dalam konteks wacana di atas menunjukkan adanya relasi kuasa paternalistik. Atas dasar itu, pemerintah atau negara membangun legitimasi kebijakan melalui narasi perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu kelompok perempuan. Selanjutnya bahasa-bahasa yang digunakan seperti “perlindungan Perempuan” digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh penerimaan publik terhadap kebijakan segregasi *gender* atau masyarakat mudah menerima Bahasa-bahasa tersebut.

Representasi perempuan sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan diperkuat oleh media digital. Media digital memperkuat konstruksi tersebut melalui framing yang menonjolkan ancaman keselamatan kaum perempuan dan seringnya kasus pelecehan seksual di transportasi publik. Media digital atau media massa cenderung menghadirkan narasi keamanan dan keselamatan kelompok perempuan sebagai isu utama dibandingkan membahas aspek kesetaraan *gender*, hak atas ruang public, dan keadilan keamanan pada transportasi umum.

2. Konstruksi Segresi Gender pada Ruang Publik

Hasil penelitian menemukan bahwa wacana kebijakan gerbang khusus wanita menghasilkan pemisahan simbolik antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Gerbang khusus wanita direpresentasikan sebagai ruang aman dan nyaman, sementara pada ruang campuran secara implisit dikonstruksikan sebagai ruang yang berpotensi membahayakan perempuan. Oleh karena itu Menteri PPPA berencana menempatkan gerbang khusus Wanita berada di tengah agar kelompok wanita bukan hanya aman terhadap pelecehan seksual tetapi aman dari kecelakaan. Sementara kelompok laki-laki ditempatkan pada

gerbang depan dan gerbang belakang yang menunjukkan bahwa posisi tersebut rawan terdampak kecelakaan. Rencana kebijakan tersebut menuai berbagai tanggapan Masyarakat khususnya pada media digital, seolah-oleh kelompok laki-laki hendak dijadikan tumbal perlindungan perempuan.

Rencana pemisahan gerbang oleh Menteri PPPA tersebut memperlihatkan adanya dikotomi sosial yang membentuk persepsi mengenai relasi *gender* dalam kehidupan publik. Konteks pada rencana kebijakan tersebut menyiratkan bahwa laki-laki secara simbolik diposisikan sebagai sumber ancaman potensial, sementara perempuan diposisikan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu perlu adanya gerbang khusus bagi perempuan dan di tempatkan di tengah-tengah agar Wanita terhindar dari ancaman pelecehan seksual dan aman dari potensi kecelakaan.

Rencana kebijakan segregasi *gender* oleh Menteri PPPA pada akhirnya tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga membentuk batas sosial dan identitas *gender* dalam Masyarakat atau disebut sebagai segregasi *gender*. Kebijakan memisahkan gerbang antara kelompok Perempuan dan kelompok laki-laki menurut Michel Foucault mengenai kekuasaan disipliner yang bekerja melalui pengaturan ruang dan tubuh sosial masuk kategori segregasi *gender* yaitu memilah-milah kebijakan anatara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan keadilan keamanan bagi semua penumpang di ruang publik. Alih-alih membela dan melindungi kelompok perempuan tetapi sampai membunuh hak keamanan dan keselamatan bagi kelompok laki-laki.

3. Hegemoni Wacana di Media dan Ruang Digital

Wacana tentang perlindungan perempuan pada ruang digital di dominasi oleh media massa sebagai media yang mereproduksi wacana dominan mengenai perlindungan perempuan. Media digital membingkai kebijakan gerbang wanita sebagai solusi keamanan dan bentuk kepedulian negara terhadap perempuan [18]. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Menteri PPPA tentang kebijakan gerbang khusus perempuan di tempatkan di tengah-tengah, hal inilah yang menjadi viral dan menuai tanggapan oleh banyak warganet.

Media digital atau media sosial menghadirkan ruang diskursif yang lebih terbuka, oleh karena itu pernyataan Menteri PPPA langsung mendapat respon dari masyarakat. Kritik terhadap pernyataan Menteri PPPA sebagai bentuk segregasi *gender* di media sosial menjadi tak terbendung. Warganet banyak menilai bahwa pemisahan gerbang bukan solusi utama terhadap kekerasan seksual karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran sosial mengenai penghormatan terhadap perempuan. Termasuk memposisikan gerbang khusus perempuan di tengah-tengah seolah hendak memposisikan kelompok laki-laki yang ditempatkan pada gerbang depan dan gerbang belakang sebagai tumbal perlindungan Perempuan karena gerbang tengah dan belakang rawan menjadi korban ketika terjadi kecelakaan.

Sebuah pernyataan yang kontroversi apa lagi dilakukan oleh pejabat negara akan selalu mendapat berbagai sorotan. Tanggapan Masyarakat apa lagi

du ruang digital sudah pasti akan menuai pro dan kontra, hal inilah yang maskud kontestasi para ruang digital. Kontestasi berkaitan dengan tanggapan pernyataan Menteri PPPA menunjukkan bahwa makna wacana selalu diperebutkan dalam ruang sosial. Publik atau warganet tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang mampu membangun narasi tandingan terhadap wacana dominan pemerintah dan media. Oleh karena itu kontestasi pada ruang digital adalah sebuah keniscayaan karena di ruang digital masyarakat leluasa berpendapat dan menilai sesuatu.

4. Relasi Kuasa dan Ideologi Gender

Penelitian menemukan bahwa polemik kebijakan gerbong khusus wanita yang rencananya akan di tempatkan di tengah merupakan arena pertarungan ideologi antara paradigma perlindungan perempuan dan paradigma kesetaraan *gender*. Satu sisi dengan mengatasmakan perlindungan terhadap kelompok perempuan terhadap pelecehan seksual dan keamanan perlu di tempatkan di tengah-tengah. Sisi lainnya menunjukkan ketimpangan *gender* karena gerbong laki-laki ditempatkan di depan dan belakang karena rentan jadi korban ketika terjadi kecelakaan, dan hal ini menunjukkan ketidakadilan *gender*.

Paradigma perlindungan merepresentasikan seolah-olah perempuan Adalah kelompok yang rentan dan perlu di lindungi sehingga membutuhkan ruang aman khusus karena tingginya risiko kekerasan seksual di ruang publik. Sementara kesetaraan *gender* memandang bahwa segregasi ruang justru berpotensi memperkuat diskriminasi *gender* dan membatasi hak perempuan atas ruang publik yang setara, memunculkan kelas antara perempuan dan laki-laki.

Wacana kebijakan terhadap perlindungan perempuan menunjukkan adanya hegemoni ideologi tertentu dalam masyarakat. Menteri PPPA membangun legitimasi bahwa segregasi ruang merupakan solusi yang wajar dan rasional terhadap persoalan keamanan Perempuan agar terhindar dari pelecehan seksual dan terjamin keamanan dan keselamatannya jika terjadi kecelakaan.

Namun demikian berdasarkan data-data yang ada hal tersebut mengakibatkan resistensi publik di media sosial yang memperlihatkan adanya kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik segregasi *gender*. Kritik masyarakat di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena demokratisasi wacana yang memungkinkan masyarakat menantang dominasi makna yang dibangun institusi negara dan media. Masyarakat sebagai kontrol sosial mampu membuat tandingan atas wacana kebijakan gerbong khusus Wanita yang ditempatkan di tengah, hingga akhirnya Menteri PPPA melakukan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi terhadap pernyataannya dan meminta maaf kepada Masyarakat Indonesia bahwa pernyataan yang berlalu disadari sebagai bentuk pernyataan yang kurang tepat.

PENUTUP

Simpulan penelitian ini adalah bahwa polemik pernyataan Menteri PPPA merupakan bentuk kontestasi wacana *gender* di ruang publik Indonesia. Pernyataan Menteri PPPA membangun narasi dominan mengenai perlindungan perempuan melalui bahasa keamanan dan kenyamanan maka perlu kebanyakan penempatan gerbong khusus Wanita berada di tengah-tengah.

Representasi perempuan sebagai kelompok yang rentan menunjukkan relasi kuasa paternalistik yang menempatkan negara sebagai pelindung. Framing diproduksi oleh media massa yang menekankan ancaman pelecehan seksual di transportasi publik.

Masyarakat melalui media sosial mengkritik segregasi *gender* sebagai bentuk pemisahan ruang sosial yang berpotensi memperkuat stereotip *gender* dan menunjukkan kegagalan negara menciptakan ruang publik yang aman secara menyeluruh.

Berdasarkan teori Norman Fairclough, polemik pernyataan Menteri PPPA menunjukkan bahwa bahasa dan media memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial mengenai *gender*, keamanan, dan hak atas ruang publik. Polemik gerbong khusus wanita menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis *gender* selalu berada dalam ruang negosiasi antara perlindungan perempuan dan prinsip kesetaraan *gender*.

Sarannya adalah diharapkan pemerintah bukan hanya mengandalkan segregasi ruang sebagai solusi keamanan perempuan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan transportasi publik secara menyeluruh melalui pengawasan, edukasi sosial, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan sistem keamanan yang profesional agar tidak terjadi kecelakaan kereta lagi.

Saran terhadap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui etnografi komunikasi, atau feminisme kritis untuk melihat pengalaman langsung pengguna transportasi publik terhadap kebijakan gerbong khusus Wanita atau meneliti mengapa terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Eka and W. Wuryanta, "*Priming - Framing - Agenda Setting ?*".
- A. L. Hamidi, A. Sekarinasih, and H. P. Waseso, "Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum dalam perspektif *gender* (Studi kasus pengguna bus Transjateng jalur Purwokerto-Purbalingga)," vol. 18, no. 1, pp. 33-58, 2023, doi: 10.24090/yinyang.v18i1.
- D. P. S. Stefani Switly Peginusa¹, Sylviana J Pelealu², Arnetha S Raintung³, "Evaluasi Jalur Pedestrian Ramah *Gender* dengan Menggunakan Indikator *Gender Impact Assestment* (GIA)," vol. 5, no. 1, pp. 11-21, 2023.
- E. Kebijakan, R. *Gender*, D. Penyediaan, G. Khusus, W. Pada, and C. Line, "Jurnal kebijakan pemerintahan," vol. 8, no. 2, pp. 66-78, 2025.

- E. T. Rusmiati, F. Angellia, and R. E. Hamzah, "Echo Chamber dan Eksklusivisme Beragama di Ruang Digital," no. 204, pp. 266–276, 2025, doi: 10.32509/wacana.v24i1.4541.
- F. S. Pratiwi, "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial," pp. 293–315, 2024.
- H. Hajrah, J. Jufri, and Ambo Dalle, "Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo: AWK Norman Fairclough," *J. Onoma Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, vol. 10, no. 3, pp. 2472–2483, 2024, doi: 10.30605/onoma.v10i3.3858.
- J. Saliman *et al.*, "Kajian manfaat gerbang khusus wanita di krl commuter line jabodetabek," vol. 3, no. 4, pp. 989–1002, 2020.
- K. Stephanie *et al.*, "Analisis kenyamanan dan efektivitas fasilitas khusus perempuan pada angkutan publik," vol. 24, no. 2, pp. 101–112.
- M. Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.
- P. Nur *et al.*, "Ketimpangan Gender Terhadap Driver Ojek Online Perempuan (Studi Kasus Pada Komunitas Grab Queen di Malang) *Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City)*," vol. 4, no. 2, pp. 56–73, 2021.
- R. Rahmatulloh, A. K. Wardana, and M. Sobahri, "Etika Berkomunikasi di Media Sosial : Perspektif Generasi Z," no. 2023, 2024.
- S. A. Fathilah, A. Fitrayani, and S. Bahtiar, "Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia," vol. 3, no. 4, pp. 174–182, 2025.
- U. Ben Laden, "Kajian Persepsi Penumpang Wanita Terhadap Kebutuhan Kereta Khusus Wanita (Studi Kasus *Commuter Line* Yogyakarta)," vol. 25, no. 3, pp. 215–224, 2025.
- S. Hasibuan, I. Rodliyah, S. Z. Thalhah, P. W. Ratnaningsih, and A. A. M. S. E, *Media penelitian kualitatif*, vol. 5, no. January. 2022. [Online]. Available: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- S. G. dan Khartini Kaluku and S. K. Wahyuddin S, *Pengantar Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, vol. 1, no. April. 2023. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_TEKNIK_PENULISAN_KARYA_ILMIAH/Nx7eEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- S. Strid and J. Hearn, "Violence and Patriarchy," L. R. B. T.-E. of V. Kurtz Peace, & Conflict (Third Edition), Ed. Oxford: Academic Press, 2022, pp. 319–327. doi: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00108-4>.

- V. Gathari and A. Bintari, "Analisis Kesenjangan *Gender* Dalam Penyelenggaraan Jalur Pejalan Kaki di Kota Bandung Tahun 2024," vol. 8, no. 4, pp. 2370–2380, 2025.
- W. P. Sari *et al.*, "Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Internasionalisasi Bahasa Indonesia Di Media Antaranews . com Bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi dalam," vol. 3, 2025, doi: 10.59638/isolek.v3i1.417.